

Proposal *Inovasi*

Transformasi Mahasiswa dari Tamu Administratif Menjadi
Mitra Pembangunan dalam Mendukung Percepatan
Pembangunan Daerah

PROPOSAL RANCANG BANGUN & POKOK PERUBAHAN:

SiCEPADTRA MBKM 2.0

(Sinergi Pencapaian Daerah melalui Penyediaan Tenaga Magang Ahli dan Terampil dalam Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2.0)

<red: Magang Berdampak>

“Transformasi Mahasiswa dari Tamu Administratif Menjadi Mitra Pembangunan dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah”

Inovasi SiCEPADTRA MBKM 2.0 Tahun 2024 merupakan pengembangan dari inovasi SiCEPADTRA MBKM Tahun 2022, dimana memiliki sifat kebaruan dengan cakupan layanan yang lebih luas (bidang studi/ disiplin ilmu/ konsentrasi terhadap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih beragam). Inovasi ini merupakan replika, tindak lanjut, dan sekaligus pengembangan dari program magang berdampak (dahulu bernama MBKM) Kemendikbud. Berikut ini rancang bangun yang digunakan dalam menentukan dan memberikan gambaran umum SiCEPADTRA MBKM 2.0 sebagai inovasi yang menunjukkan kebaruan, keunikan, kekhususan, dan/atau prosedur untuk menyelesaikan permasalahan keterbatasan jumlah SDM (sumber daya manusia) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

A. Dasar Hukum Inovasi

Berikut ini dasar hukum yang digunakan pada inovasi ini:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Mengamanatkan adanya kerja sama antara perguruan tinggi dengan instansi pemerintah/swasta untuk meningkatkan kualitas lulusan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah: Mengatur bagaimana Pemerintah Daerah menjalin kesepakatan (MoU) dengan pihak ketiga, dalam hal ini pihak kampus (universitas/perguruan tinggi).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah: Menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menciptakan skema Magang Berdampak, artinya mahasiswa tidak hanya datang untuk fotokopi namun diberikan tugas spesifik untuk membantu program prioritas dan capaian kinerja daerah, khususnya mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah untuk mewujudkan good governance.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Menjadi dasar hukum program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka, atau saat ini telah berubah menjadi Magang Berdampak), dimana mewajibkan perguruan tinggi memberikan hak belajar di luar kampus (salah satunya magang di instansi pemerintah) selama maksimal 3 semester.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Menjadi landasan bahwa inovasi harus

berujung pada perbaikan layanan kepada masyarakat, dalam hal ini mahasiswa semester akhir.

6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah: Memberikan payung hukum bagi setiap OPD untuk menciptakan terobosan tata kelola pemerintahan, termasuk skema kolaborasi dengan pihak eksternal seperti universitas/ perguruan tinggi.
7. Keputusan Bupati Rembang Nomor 050/2829/2022 tentang Penetapan Inovasi Daerah dan Kreativitas Inovasi Masyarakat Kabupaten Rembang Tahun 2022: Menjadi dasar penetapan dan pengembangan inovasi SiCEPADTRA MBKM Tahun 2022 menjadi SiCEPADTRA MBKM 2.0 Tahun 2024.

B. Permasalahan

Masalah utama yang dapat diselesaikan dari inovasi ini dapat diuraikan menjadi 2 jenis berdasarkan sumbernya, yaitu:

1. Bagi mahasiswa semester akhir, magang bukan sekadar pengisi waktu atau penggugur kewajiban SKS. Ada beberapa permasalahan mendasar yang menjadi alasan kuat mengapa inovasi ini sangat krusial sebelum fresh graduate benar-benar terjun ke dunia kerja, diantaranya:
 - Kesenjangan kompetensi (skill gap), dimana dunia akademik seringkali lebih berfokus pada teori, sementara dunia kerja dinamis dan praktis. Sebagai contoh mahasiswa mungkin menguasai teori kebijakan publik, namun gagap saat harus menyusun draf surat dinas atau mengelola data riil di lapangan. Guna menutup celah antara apa yang dipelajari di kelas dengan kebutuhan nyata di instansi, magang menjadi solusinya.
 - Kurangnya budaya kerja (workplace literacy), dimana mahasiswa semester akhir seringkali belum memiliki gambaran tentang etika dan ritme kerja profesional. Ketidaktahuan mengenai hirarki organisasi, tata krama berkomunikasi dengan atasan (birokrasi), hingga manajemen waktu dalam menyelesaikan deadline kantor menjadi dasar utama dibutuhkan magang agar mahasiswa mampu menerima simulasi nyata tentang bagaimana berperilaku sebagai profesional dalam lingkungan pemerintahan.
 - Masalah daya serap kerja (employability), dimana lulusan baru (fresh graduate) sering kesulitan bersaing karena portofolio yang kosong. Perusahaan atau instansi cenderung mencari orang yang sudah "siap pakai" daripada harus melatih dari nol, sehingga biasanya terdapat syarat kerja pengalaman kerja minimal 1 tahun namun juga terbuka untuk fresh graduate, sehingga lulusan baru yang tidak memiliki pengalaman kerja menjadi tidak memiliki daya saing pula terhadap lulusan yang sudah memiliki pengalaman kerja. Fenomena lapangan kerja yang banyak mencantumkan pengalaman kerja minimal 1 tahun bagi fresh graduate mendorong inovasi magang ini dibutuhkan mahasiswa sebagai bagian dari portofolio pengalaman kerja yang diperlukan agar dapat dicantumkan dalam CV. Pemberian bukti pengalaman kerja nyata dapat meningkatkan nilai tawar fresh graduate saat melamar kerja setelah lulus.
 - Krisis identitas karir, dimana banyak mahasiswa semester akhir masih bimbang terkait bidang yang ingin digeluti. Hal ini dapat berdampak terhadap demotivasi di awal masa kerja. Maka dari itu, magang menjadi

ajang uji coba (test drive) bagi mahasiswa untuk merasakan langsung dinamika kerja di sektor pemerintahan sebelum berkomitmen penuh.

- Minimnya jejaring (networking), dimana keberhasilan karier seringkali dipengaruhi oleh siapa yang kita kenal, bukan hanya apa yang kita tahu. Mahasiswa yang hanya berada di lingkungan kampus akan memiliki jaringan terbatas pada sesama akademisi, sehingga magang membuka akses komunikasi dengan para praktisi, pejabat daerah, dan profesional yang bisa menjadi mentor atau pemberi referensi kerja di masa depan.
2. Bagi pemerintah daerah, Kabupaten Rembang seringkali kekurangan SDM (sumber daya manusia) dalam mencapai tujuan dan target kinerja organisasi, sehingga dibutuhkan tenaga magang sebagai tenaga ahli dan/atau terampil tambahan untuk menunjang pencapaian tujuan dan target kinerja daerah. Disisi lain, adanya tekanan desentralisasi fiskal yang mengharuskan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD menjadikan tenaga magang dibutuhkan sebagai pengganti belanja pegawai yang membebani APBD Rembang mencapai proporsi 44,02%. Tenaga magang menjadi solusi karena tidak membebani APBD, mengingat magang bersifat gratis Rp0 (tanpa mengeluarkan belanja gaji dan tunjangan pegawai). Namun yang perlu diperhatikan adalah biasanya jangka waktu yang ditetapkan oleh kampus hanya antara 1-6 bulan, sehingga dalam menekan belanja pegawai secara masif skala pemda perlu dilakukan sebagai bagian dari pengembangan inovasi kedepannya (SiCEPADTRA MBKM 3.0 Tahun 2027), serta perlu adanya promosi masif pada kampus-kampus sehingga tidak terjadi kekosongan durasi terhadap kebutuhan tenaga magang (menanggulangi durasi magang yang berbeda dari setiap kampus).

C. Isu Strategis

Inovasi SiCEPADTRA MBKM 2.0 yang mendukung program Magang Berdampak Kemendikbud menyatukan permasalahan mahasiswa yang membutuhkan pengalaman dan permasalahan pemda yang membutuhkan tenaga tambahan, muda, dan fast learner dalam meningkatkan capaian kinerja organisasi daerah secara gratis. Bahkan dalam pengembangan kedepannya, SiCEPADTRA MBKM 3.0 Tahun 2027 dapat menjadi salah satu solusi agar beban belanja pegawai APBD tidak lebih dari 30% sehingga tidak diberikan sanksi pengurangan TKD yang dimulai pada tahun 2027. Maka dari itu, inovasi ini menghadirkan tenaga magang dengan fokus utama bahwa kehadiran mahasiswa bukan lagi dianggap sebagai "beban administrasi", namun OPD/Pemda dapat menangkap potensi SDM magang sebagai amunisi tambahan bagi daerah untuk mempercepat dan/atau meningkatkan kinerja pembangunan.

D. Tujuan Inovasi

Tujuan inovasi SiCEPADTRA MBKM 2.0 adalah menciptakan simbiosis mutualisme yang terukur antara mahasiswa, kampus, dan pemerintah daerah secara solutif, edukatif, dan kolaboratif. Magang harus menghasilkan solusi bagi kendala yang ada di OPD/Pemda (kekurangan SDM, beban belanja pegawai yang tinggi pada postur APBD, dll.), magang mampu mempercepat dan meningkatkan capaian tujuan dan kinerja pemda, magang harus menjadi laboratorium pembelajaran yang berkualitas bagi mahasiswa semester akhir, magang harus mampu memperkuat jejaring kerja sama antarinstansi dengan institusi pendidikan tinggi, serta jejaring dunia kerja bagi mahasiswa.

E. Manfaat Inovasi

Manfaat inovasi SiCEPADTRA MBKM 2.0 memiliki 3 pilar utama penerima manfaat, diantaranya:

1. Bagi pemda (akselerasi pembangunan)
 - Percepatan program prioritas dan efisiensi birokrasi: memanfaatkan tenaga dan ide segar mahasiswa untuk menyelesaikan target daerah secara cepat dan positif (meningkat).
 - Injeksi inovasi: mendapatkan masukan berbasis riset dan teknologi terbaru dari dunia akademik (perspektif baru dari Gen Z) untuk memperbaiki tata kelola pelayanan publik di OPD.
 - *Talent scouting*: menjangkar bibit-bibit unggul (khususnya putra-putri asli daerah Rembang) yang berpotensi menjadi mitra atau calon ASN yang sudah memahami budaya kerja, khususnya di Pemkab Rembang.
 - Efisiensi APBD: berpotensi menekan belanja pegawai 40% menjadi 30% dari total belanja APBD.
 - Citra positif daerah: menempatkan pemda sebagai daerah adaptif, kolaboratif, ramah terhadap talenta muda, dan berdaya saing.
2. Bagi mahasiswa (kesiapan kerja dan portofolio)
 - Penyelesaian masalah riil: memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu kuliah dalam memecahkan masalah nyata di birokrasi, bukan sekadar tugas simulasi melainkan kesiapan karier.
 - Peningkatan keahlian (*hard and soft skills*): mengasah kemampuan teknis sesuai bidang ilmu dan penerapannya, sekaligus melatih etika kerja, komunikasi birokrasi, dan kepemimpinan agar memiliki mentalitas kerja dan pemahaman mendalam terkait tata kelola pemerintahan.
 - Rekam jejak profesional: membangun portofolio yang kuat. Mahasiswa tidak hanya membawa sertifikat magang, tapi membawa "bukti karya". Misalnya Bagian dari Tim Penyusun RTBL Alun-Alun Rembang, atau Tim Pembangunan Embung X.
 - Membangun relasi dengan para pejabat dan praktisi di lingkungan Pemda.
 - Menyelesaikan SKS sesuai kewajiban akademik melalui jalur resmi MBKM - Magang Berdampak yang diakui oleh kampus.
3. Bagi perguruan tinggi (implementasi MBKM - Magang Berdampak)
 - Relevansi kurikulum: memastikan materi yang diterima oleh mahasiswa tetap relevan dengan dinamika dan kebutuhan industri/ pemerintahan saat ini.
 - Pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama): memenuhi target persentase mahasiswa yang mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus (sesuai standar Kemendikbudristek).
 - Link and match: memperkecil jurang antara kurikulum kampus dengan kebutuhan nyata di lapangan (khususnya sektor publik).

F. Metode Pembaharuan (Upaya yang Dilakukan Sebelum dan Sesudah)

Berikut adalah perbandingan metode pembaharuan yang dilakukan sebagai upaya transformasi sebelum dan sesudah adanya inovasi SiCEPADTRA MBKM dan SiCEPADTRA MBKM 2.0:

1. Metode rekrutmen dan penempatan, dimana sebelumnya pemda hanya menunggu surat permohonan dari kampus/mahasiswa. Sesudah inovasi ini, pemda aktif promosi secara daring melalui berbagai kanal media termasuk pencarian google AI terkait penerimaan magang di DPUTARU Kabupaten Rembang. Selain itu, pemda juga melakukan mapping (proaktif)/ pemetaan kebutuhan (need assessment).
2. Fokus penugasan (job description), dimana sebelumnya mahasiswa lebih banyak mengerjakan tugas administrasi ringan (clerical work) seperti fotokopi, mengantar surat, atau mengarsip dokumen manual tanpa output yang nyata selain laporan magang (formalitas). Sesudah inovasi ini, mahasiswa diberikan 1 proyek kecil (project based) yang harus diselesaikan, misalnya pembuatan peta digital tutupan lahan tahun termutakhir, kajian RTH dalam penyusunan RTBL Alun-Alun dan Sekitarnya, penyusunan laporan keuangan SKPD, dll. Mahasiswa dilibatkan dalam pemecahan masalah, analisis, perencanaan, dan/atau pelaporan riil birokrasi sehingga keberadaan tenaga magang benar-benar meringankan beban kerja ASN serta mahasiswa memperoleh pembelajaran dan pengalaman yang riil di dunia kerja.
3. Sistem pendampingan (mentoring), dimana sebelumnya mahasiswa sering dibiarkan belajar mandiri tanpa bimbingan intensif dari staf senior dan penilaian akhir hanya berdasarkan kehadiran atau perilaku umum. Sesudah inovasi ini, penunjukan ASN sebagai mentor yang memiliki kompetensi serupa dengan bidang ilmu mahasiswa akan memberikan feedback mingguan atau bulanan terhadap progres proyek yang dikerjakan mahasiswa. Dalam hal ini, ASN sebagai mentor harus memiliki dedikasi tinggi dan ilmu yang cukup untuk memberikan ilmu dan mengarahkan mahasiswa terhadap proyek yang dikerjakan agar tercipta proses quality control terhadap produk yang dihasilkan (berkualitas).
4. Output dan legitimasi, dimana sebelumnya hasil magang hanya berupa laporan yang menumpuk di perpustakaan kampus tanpa sertifikat khusus (hanya surat keterangan magang biasa). Sesudah inovasi ini, mahasiswa mampu menghasilkan produk yang bermanfaat langsung bagi pemda (tujuan dan capaian kinerja daerah), serta mahasiswa juga mendapatkan sertifikat yang dapat diklaim sebagai portofolio (CV) dalam mendaftar kerja ketika sudah lulus. Dalam beberapa kasus, kerja sama (PKS) dapat dilakukan antara OPD/Pemda dengan kampus sehingga mahasiswa mendapatkan pengakuan konversi SKS dengan besaran tertentu (diatur oleh kampus, biasanya 20 SKS dengan durasi magang 5-6 bulan) dan sah secara akademis (sesuai peraturan Kemendikbud).

G. Keunggulan dan Kebaruan

Penyelenggaraan magang pada inovasi ini terdiri dari 3 jenis yang menjadi unggulan dan bernilai kebaruan, yaitu magang mandiri, magang kerja sama pusat-daerah, magang kemitraan kampus.

1. Magang mandiri merupakan pelaksanaan magang yang dilaksanakan atas dasar pengajuan permohonan magang mahasiswa kepada OPD.

2. Magang kerja sama pusat-daerah merupakan pelaksanaan magang yang dilaksanakan atas dasar kerja sama pemerintah pusat dengan pemda (pengembangan SiCEPADTRA MBKM 3.0 Tahun 2027, misalnya Pemda Kabupaten Rembang dengan Kemendikbud melalui Program MSIB - Magang Berdampak, Bidang Tata Ruang dengan Kementerian ATR/BPN melalui Program MSIB Inspiring, dll dimana biasanya mentor dan mentee mendapatkan honor/living cost selama magang dari pemerintah pusat).
3. Magang kemitraan kampus merupakan pelaksanaan magang yang dilaksanakan atas dasar kerja sama pemda dengan kampus secara langsung sehingga sertifikat yang diterbitkan oleh OPD/Pemda dapat dikonversikan menjadi SKS dengan besaran tertentu (biasanya 20 SKS untuk 5-6 bulan, sesuai ketentuan kampus masing-masing).

Selain itu, keunggulan dan kebaruan pada SiCEPADTRA MBKM 2.0 Tahun 2024 dibandingkan 2022 adalah cakupan layanannya. Pada tahun 2022 masih terbatas pada urusan pekerjaan tata ruang dengan proyek penyusunan RDTR, sedangkan pada tahun 2024 inovasi ini berkembang untuk seluruh urusan pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi perencanaan dan kebijakan, keuangan, kepegawaian dan umum, sumber daya air, jalan dan jembatan, bangunan gedung dan lingkungan, sanitasi dan air minum, serta tata ruang.

Secara umum, kebaruan pada inovasi ini menekankan pada status mahasiswa yang berubah dari "tamu" administratif menjadi "mitra" pembangunan daerah, pola kerja yang berubah dari rutinitas kantor menjadi penugasan berbasis proyek (impactful), output yang berubah dari laporan magang standar (formalitas) menjadi solusi inovatif bagi pemda untuk mempercepat dan meningkatkan capaian tujuan dan kinerja daerah, serta orientasi yang berubah dari gugur kewajiban SKS menjadi pengembangan kompetensi dan dampak sosial.

H. Tahapan Inovasi/ Penggunaan Produk

Pada awalnya inovasi SiCEPADTRA MBKM dirancang pada tahun 2021 dan mulai diterapkan pada tahun 2022 dengan lingkup urusan percepatan penyusunan RDTR. Pada tahun 2024, inovasi ini secara bertahap mulai berkembang menjadi 2.0 dengan model pengembangan dengan lingkup urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Pada tahun 2027/2028 direncanakan untuk dikembangkan menjadi 3.0 dengan skala yang lebih besar lagi, yaitu lingkup penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Rembang (jika mendapatkan persetujuan dari Bupati dan stakeholder terkait).

Berikut ini penggunaan produk inovasi berdasarkan jenisnya.

1. Magang Mandiri
 - Pemda melakukan promosi melalui berbagai kanal media pemda
 - Mahasiswa mendaftar magang dengan mengajukan surat permohonan secara daring/luring
 - Proses seleksi (jika pendaftar melebihi kuota - need assessment)
 - Penyepakatan durasi, jadwal, metode, dan kegiatan/proyek
 - Pelaksanaan magang
 - Pemenuhan administrasi akhir magang mandiri

2. Magang Kerja Sama Pusat - Daerah

- Pemda mengajukan permohonan kepada instansi pembina/terkait/pemerintah pusat
- Pemerintah pusat meninjau dan mengevaluasi kelayakan permohonan
- Peserta magang melakukan pendaftaran sesuai prosedur dari pemerintah pusat, termasuk proses seleksi dan pengumuman (sesuai kebijakan pemerintah pusat masing-masing)
- Penempatan dan penerimaan peserta magang dari pemerintah pusat ke pemda tanpa melalui proses seleksi (oleh pemda)
- Pelaksanaan magang sesuai durasi dan target yang ditetapkan
- Pemenuhan administrasi akhir dan pelaporan kepada pemerintah pusat

3. Magang Kemitraan Kampus

- Pemda melakukan promosi kepada kampus
- Kampus mengajukan permohonan kerja sama
- Pemda menyetujui kerja sama dengan kampus
- Pemda menerima distribusi mahasiswa dari pihak kampus (proses seleksi sesuai kebijakan kampus masing-masing) tanpa melalui proses seleksi (oleh pemda)
- Pelaksanaan magang sesuai durasi, jadwal, metode, dan kegiatan (proyek) yang telah disepakati dengan pihak kampus
- Pemenuhan administrasi akhir magang kemitraan kampus

I. Rencana Anggaran

Inovasi ini tidak memerlukan pembiayaan tenaga magang karena sifat dari simbiosis mutualisme nonfiskal yang dihasilkan, sehingga tidak menggunakan APBD untuk belanja pegawai, honor, *living cost*, dan/atau sejenisnya dalam menyediakan tenaga magang di OPD/Pemda.

1. Belanja Pegawai DPUTARU

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR DPA-BELANJA SKPD					
KAB. REMBANG TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.03.00000012025															
SKPD : 1.03.0.00.0.00.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan															
Urutan	Bidang	Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah					T+1
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1.03.0.00.0.00.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										Rp26.306.381.692,00	Rp123.940.931.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.247.312.692,00	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp26.306.381.692,00	Rp123.940.931.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.247.312.692,00	
1	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				Rp26.306.381.692,00	Rp123.940.931.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.247.312.692,00	
1	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp10.797.312.692,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.797.312.692,00	
1	03	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	
1	03	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	
1	03	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	
1	03	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	
1	03	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	
1	03	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp9.797.312.692,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.797.312.692,00	
1	03	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.348.391.571,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.348.391.571,00	

2. Rencana Anggaran Belanja Pegawai DPUTARU

1/8/25, 6:48 PM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.03.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
Program : 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.03.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
Unit : 1.03.0.00.0.00.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp9.348.391.571,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp8.600.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp9.348.391.571,00		
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			107 Orang/bulan		
Hasil						
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp9.348.391.571,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.348.391.571,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp9.348.391.571,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp7.190.303.000,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp5.353.464.000,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp4.461.283.000,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.461.283.000,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					Rp4.461.283.000,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp4.461.283.000,00	0%	Rp4.461.283.000,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp892.181.000,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp892.181.000,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp892.181.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	(%)	
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp892.181.000,00	0%	Rp892.181.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN			Rp517.120.000,00		Rp517.120.000,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS			Rp477.020.000,00		Rp477.020.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS			Rp477.020.000,00		Rp477.020.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS			Rp477.020.000,00		Rp477.020.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp477.020.000,00	0%	Rp477.020.000,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			Rp60.100.000,00		Rp60.100.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			Rp60.100.000,00		Rp60.100.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			Rp60.100.000,00		Rp60.100.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp60.100.000,00	0%	Rp60.100.000,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN			Rp136.570.000,00		Rp136.570.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS			Rp136.570.000,00		Rp136.570.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS			Rp136.570.000,00		Rp136.570.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS			Rp136.570.000,00		Rp136.570.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp136.570.000,00	0%	Rp136.570.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN			Rp93.044.000,00		Rp93.044.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS			Rp93.044.000,00		Rp93.044.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS			Rp93.044.000,00		Rp93.044.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS			Rp93.044.000,00		Rp93.044.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp93.044.000,00	0%	Rp93.044.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN			Rp222.420.000,00		Rp222.420.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			Rp170.690.000,00		Rp170.690.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			Rp170.690.000,00		Rp170.690.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			Rp170.690.000,00		Rp170.690.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp170.690.000,00	0%	Rp170.690.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK			Rp51.730.000,00		Rp51.730.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK			Rp51.730.000,00		Rp51.730.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK			Rp51.730.000,00		Rp51.730.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp51.730.000,00	0%	Rp51.730.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Bersas ASN			Rp270.705.000,00		Rp270.705.000,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Bersas PNS			Rp270.705.000,00		Rp270.705.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Bersas PNS			Rp270.705.000,00		Rp270.705.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Belanja Tunjangan Bersas PNS			Rp270.705.000,00		Rp270.705.000,00
	Belanja Tunjangan Bersas PNS	1 Tahun	Tahun	Rp270.705.000,00	0%	Rp270.705.000,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Bersas PPPK			Rp43.987.000,00		Rp43.987.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	(%)	
	[#] Belanja Tunjangan Bersas PPPK			Rp43.987.000,00		Rp43.987.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Belanja Tunjangan Bersas PPPK			Rp43.987.000,00		Rp43.987.000,00
	Belanja Tunjangan Bersas PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp43.987.000,00	0%	Rp43.987.000,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN			Rp153.911.000,00		Rp153.911.000,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp153.911.000,00		Rp153.911.000,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp153.911.000,00		Rp153.911.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp153.911.000,00		Rp153.911.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp153.911.000,00	0%	Rp153.911.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN			Rp78.000,00		Rp78.000,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS			Rp78.000,00		Rp78.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS			Rp78.000,00		Rp78.000,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp78.000,00	0%	Rp78.000,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PPPK			Rp18.000,00		Rp18.000,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS			Rp18.000,00		Rp18.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS			Rp18.000,00		Rp18.000,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp18.000,00	0%	Rp18.000,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK			Rp60.000,00		Rp60.000,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK			Rp60.000,00		Rp60.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK			Rp60.000,00		Rp60.000,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp60.000,00	0%	Rp60.000,00
5.1.01.01.09	Belanja Jaminan Kesehatan ASN			Rp276.260.000,00		Rp276.260.000,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Jaminan Kesehatan PNS			Rp276.260.000,00		Rp276.260.000,00
	[#] Belanja Jaminan Kesehatan PNS			Rp276.260.000,00		Rp276.260.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Belanja Jaminan Kesehatan PNS			Rp276.260.000,00		Rp276.260.000,00
	Belanja Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp276.260.000,00	0%	Rp276.260.000,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Jaminan Kesehatan PPPK			Rp60.160.000,00		Rp60.160.000,00
	[#] Belanja Jaminan Kesehatan PPPK			Rp60.160.000,00		Rp60.160.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Belanja Jaminan Kesehatan PPPK			Rp60.160.000,00		Rp60.160.000,00
	Belanja Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp60.160.000,00	0%	Rp60.160.000,00
5.1.01.01.10	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja ASN			Rp13.244.000,00		Rp13.244.000,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp11.162.000,00		Rp11.162.000,00
	[#] Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp11.162.000,00		Rp11.162.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp11.162.000,00		Rp11.162.000,00
	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp11.162.000,00	0%	Rp11.162.000,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp2.142.000,00		Rp2.142.000,00
	[#] Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp2.142.000,00		Rp2.142.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp2.142.000,00		Rp2.142.000,00
	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp2.142.000,00	0%	Rp2.142.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	(%)	
5.1.01.01.11	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp2.142.000,00	0%	Rp2.142.000,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp20.306.000,00		Rp20.306.000,00
	[#] Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp20.306.000,00		Rp20.306.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp20.306.000,00		Rp20.306.000,00
	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp20.306.000,00	0%	Rp20.306.000,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp4.424.000,00		Rp4.424.000,00
	[#] Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp4.424.000,00		Rp4.424.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp4.424.000,00		Rp4.424.000,00
	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp4.424.000,00	0%	Rp4.424.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan berdasarkan Beban Kerja ASN			Rp2.158.865.571,00		Rp2.158.865.571,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN			Rp2.158.865.571,00		Rp2.158.865.571,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			Rp2.040.865.000,00		Rp2.040.865.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			Rp2.040.865.000,00		Rp2.040.865.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.040.865.000,00	0%	Rp2.040.865.000,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			Rp117.428.571,00		Rp117.428.571,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			Rp117.428.571,00		Rp117.428.571,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			Rp117.428.571,00		Rp117.428.571,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp117.428.571,00	0%	Rp117.428.571,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan			Rp9.348.391.571,00		Rp9.348.391.571,00

J. Hasil Inovasi


Hasil yang diperoleh dari inovasi SiCEPADTRA MBKM 2.0, diantaranya:

1. Produk yang dihasilkan relatif lebih cepat dan mendukung peningkatan pencapaian tujuan dan kinerja Pemda, khususnya pada urusan:
 - a. Umum dan kepegawaian;
 - b. Perencanaan dan evaluasi program kerja;
 - c. Keuangan;
 - d. Perencanaan, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan;
 - e. Perencanaan, pembangunan, dan preservasi bangunan gedung;
 - f. Perencanaan, pembangunan, dan preservasi bangunan dan lingkungan;
 - g. Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan/evaluasi bina jasa konstruksi;
 - h. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang;
 - i. Perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan sanitasi (persampahan, air limbah, dan drainase);
 - j. Perencanaan, pembangunan, dan preservasi air minum; dan
 - k. Perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan sumber daya air.

2. Laporan kajian/analisis secara tertulis dan terdokumentasi dengan baik dengan kualitas yang optimal (peran mentor sebagai *quality control*). Seluruh produk laporan ini dapat berupa kebijakan/ aplikasi/ kajian/ dokumen dan/atau sejenisnya yang mendukung tercapainya tujuan dan capaian kinerja DPUTARU pada urusan:
 - a. Umum dan kepegawaian;
 - b. Perencanaan dan evaluasi program kerja;
 - c. Keuangan;
 - d. Perencanaan, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan;
 - e. Perencanaan, pembangunan, dan preservasi bangunan gedung;
 - f. Perencanaan, pembangunan, dan preservasi bangunan dan lingkungan;
 - g. Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan/evaluasi bina jasa konstruksi;
 - h. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang;
 - i. Perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan sanitasi (persampahan, air limbah, dan drainase);
 - j. Perencanaan, pembangunan, dan preservasi air minum; dan
 - k. Perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan sumber daya air.
3. Sertifikat magang resmi beserta nilai dan deskripsi kompetensi yang dikuasai, serta diakui oleh kampus.
4. Logbook dan portofolio (CV) sebagai bukti kumpulan karya yang meningkatkan daya saing pengalaman kerja nyata.
5. Dokumen PKS (perjanjian kerja sama) jika melalui skema kerja sama untuk meningkatkan kerja sama formal jangka panjang antarstakeholder.
6. Menjadi salah satu opsi untuk mengurangi tekanan belanja pegawai APBD tanpa mengurangi kualitas produk, target, capaian kinerja, dan tujuan pembangunan daerah yang dihasilkan.

Rembang, 1 November 2024

Melalui,
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DPUTARU KABUPATEN REMBANG


FARIDA IRMA SULESTIYANI, S.H., M.M.
Penata

NIP. 198105172010012002

Inisiator,
ANALIS KELEMBAGAAN


DANNA PRASETYA NUSANTARA, S.T., M.P.W.K.
Penata Muda Tk. I

NIP. 199506192019021001

Menyetujui,
SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG


BUDI PRIYANGGODO, S.T.

Pembina Tk. I

NIP. 197511032003121002

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG



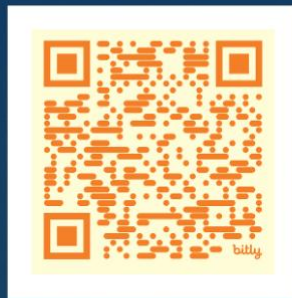

MARYOSA, A.TD, M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 196712111990031007



SiCEPADTRA



<https://bit.ly/SiCEPADTRAMBKM>



Inovasi Tata Kelola Pemerintahan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang